

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dalam penggunaan media elektronik akhir-akhir ini semakin berkembang dan marak di Indonesia. Apabila diperhatikan maka perkembangan Teknologi Informasi sangatlah pesat bila dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Sebagai otoritas yang mengatur penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor perbankan dalam menghadapi Digital Perbankan, bagaimana perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penggunaan digital banking dalam bisnis perbankan di indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan dalam transaksi digital banking bagi Bank atau Nasabah.

Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Perlu kiranya diperhatikan untuk memberikan kewajiban yang seimbang, kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data diri seperti password, kata kunci (*One Time Password OTP*), tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain-lain. Jika sekiranya abai dalam menjaga rahasia diri tersebut dan rekeningnya di bobol akan menjadi tanggungjawab dari nasabah yang bersangkutan.

Menentukan dengan jelas kriteria antara nasabah yang beritikad baik dan buruk pada dunia perbankan digital. Mengingat bahwa dunia digital berjalan begitu cepat kiranya perlu pembaharuan perundangan yang ada dan membuatnya lebih rinci bagi kedua belah pihak yaitu perbankan dan nasabah.

Masih perlu dilakukan kampanye penggunaan digital mengingat survei yang dilakukan memperlihatkan adanya keengganahan masyarakat beralih ke pelayanan dunia digital yang efisien dan murah.

Keyword: *Digital Banking, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Technological advances in the use of electronic media have recently been growing and rise in Indonesia. If you pay attention, the development of Information Technology is very fast when compared to other fields. As the authority that regulates the implementation of an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the banking sector in dealing with Digital Banking, how is the Financial Services Authority (FSA) legal protection for the use of digital banking in the banking business in Indonesia and how is legal responsibility for errors in digital banking transactions for banks or customers.

Normative Legal Research, is legal research conducted by examining library materials or secondary data, normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced.

It is necessary to pay attention to providing a balanced obligation, the customer's obligation to maintain the confidentiality of personal data such as passwords, keywords (One Time Password OTP), date of birth, biological mother's name and others. If you neglect to keep your secret and your account is compromised, it will be the responsibility of the customer in question.

Clearly define the criteria between customers with good and bad intentions in the world of digital banking. Given that the digital world is running so fast, it would be necessary to update existing laws and make them more detailed for both parties, namely banks and customers. It is still necessary to carry out a digital use campaign considering that the survey conducted shows the public's reluctance to switch to efficient and inexpensive digital services.

Keyword: digital banking, Financial Services Authority, law protection